

**PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM INTERNALISASI
WAWASAN KEBANGSAAN BAGI GENERASI MUDA UNTUK MENCEGAH
DISINTEGRASI BANGSA DI KOTA CIMAHİ PROVINSI JAWA BARAT**

Ferga Anugrah Putra
NPP. 30.0542

*Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: putraferga@gmail.com*

ABSTRACT

***Problems/Background (GAP):** Indonesia is known as a multicultural country with a variety of cultures that have the potential for people to be vulnerable to intergroup conflict and difficult to develop social integration. The threats of national disintegration has penetrated several regions of Indonesia, one of them is in Cimahi City which is marked by the emergence of radical ideological communities that penetrate the educational world, hence it becomes a threat to the youth generation who should be a milestone in nation building. This is a challenge for the Political and National Unity Agency of Cimahi City, which has duties and functions to create social and political stability. **Purpose:** The purpose of this research is to find out the role of National and Political Unity Agency in internalizing national insight for the youth generation to prevent national disintegration in Cimahi City. **Method:** This thesis uses Soekanto's roles theory which consists of actual roles, expected roles, position roles, and behavioral roles. This research uses descriptive qualitative method with data references and literature research. Data collection techniques were carried out by interview and documentation then using data analysis techniques which are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. **Results/Findings** The results show that the role of the National Unity and Political Agency in internalizing national insight for the youth generation to prevent national disintegration has been carried out such as holding a forum for socializing national insight to the younger generation even though there are still obstacles found such as budget limitations, inadequate human resources and inadequate office infrastructure. **Conclusion:** For the supporting factors are the area of Cimahi City is not too large, cooperation with stakeholders, and the people of Cimahi City who tolerate each other. Efforts made in overcoming obstacles are to cooperate with other agencies to cover the shortcomings that hinders the program.*

***Keywords:** Roles, National Insight, Youth Generation, Integration*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Indonesia dikenal sebagai negara multikultural dengan beragam budaya yang berpotensi masyarakat rentan mengidap konflik antar kelompok serta sulit dalam mengembangkan integrasi sosialnya. Ancaman disintegrasi bangsa di beberapa wilayah Indonesia salah satunya Kota Cimahi ditandai dengan munculnya komunitas ideologi radikal yang merambah ke dunia pendidikan sehingga menjadi ancaman untuk generasi muda yang seharusnya menjadi tonggak pembangunan bangsa. Hal ini menjadi tantangan bagi Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Cimahi yang memiliki tugas dan fungsi untuk menciptakan kestabilan sosial dan politik. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menginternalisasi wawasan kebangsaan bagi generasi muda untuk mencegah disintegrasi bangsa di Kota Cimahi. Skripsi ini menggunakan teori peran Soekanto yang terdiri dari peran nyata, harapan peran, peran kedudukan, dan perilaku peran. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan referensi data dan literatur hasil penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi kemudian menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menginternalisasi wawasan kebangsaan bagi generasi muda untuk mencegah disintegrasi bangsa sudah terlaksana

sepertimengadakan forum sosialisasi wawasan kebangsaan kepada generasi muda walaupun masih terdapat kendala yang ditemukan seperti keterbatasan anggaran, Sumber Daya Manusia kurang memadai serta infrastruktur kantor kurang memadai. Adapun yang menjadi faktor pendukungnya adalah wilayah Kota Cimahi yang tidak terlalu luas, kerjasama dengan *stakeholders*, serta masyarakat Kota Cimahi yang saling toleransi. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan adalah dengan bekerja sama dengan instansi-instansi lain untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang menghambat program.

Kata Kunci: Peran, Wawasan Kebangsaan, Generasi Muda, Integrasi.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai 13.600 pulau dengan luas membentang dari ujung barat ke ujung timur sebesar 5111 km dan utara ke selatan sebesar 1889 km. Dengan banyaknya pulau dan keluasan wilayahnya, Indonesia dikenal sebagai negara multikultural yang ditandai oleh aneka ragam budaya yang spesifik tiap pulaunya. Menurut Fischer (1959) keragaman budaya di Indonesia dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu geografis, keadaan iklim, dan faktor-faktor induk bangsa. Keberagaman bangsa Indonesia ditandai oleh banyaknya jumlah suku bangsa dengan perbedaan ras, bahasa, budaya yang disatukan dalam satu negara sehingga Indonesia dikategorikan sebagai negara majemuk. J.S Furnival mengatakan masyarakat majemuk diartikan memiliki dua atau lebih tradisi kultural, kelompok, atau komunitas yang hidup berdampingan satu sama lain tanpa terintegrasi dalam kesatuan politik. Dengan sulitnya mengembangkan integrasi sosial maka ancaman disintegrasi bangsa di beberapa wilayah Indonesia berkembang dengan kuat bahkan generasi muda yang seharusnya menjadi tonggak bagi kemajuan dan pembangunan bangsa mulai terjerat konflik berupa keinginan perubahan tatanan sosial dan politik yang dapat merusak demokrasi yang telah diterapkan di Indonesia. Generasi muda secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional. Mereka memiliki semangat pembaharu dan progresif sehingga mereka seringkali melakukan aksi demonstrasi. Proses reformasi memunculkan harapan tinggi bagi masyarakat akan kehidupan bernegara, hal itu menimbulkan dorongan masyarakat untuk melakukan koreksi di segala bidang pembangunan. Pada era zaman sekarang telah berkembang teknologi digital dengan banyaknya arus informasi dan komunikasi yang dapat memberikan peluang besar untuk informasi mudah tersebar. Konten-konten bersifat provokatif dan paham radikalisme yang tersebar di media sosial dapat dengan mudah mempengaruhi generasi muda yang aktif di era digital sehingga untuk menangkal paham radikalisme di era digital perlunya penanaman nilai-nilai bela negara. Dalam meningkatkan wawasan kebangsaan, generasi muda Indonesia diberikan ilmu pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan nilai-nilai Pancasila agar tertanam kuat dalam hati generasi muda agar tidak mudah terjerumus pada paham yang memicu disintegrasi seperti radikalisme. Pada saat ini warga Kota Cimahi sedang diresahkan dengan kehadiran kelompok khilafatul muslimin yang tengah muncul di Kota Cimahi. Dilansir pada detik.com edisi 9 Juni 2022 Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi No. 59 Tahun 2021 pasal 185 ayat 1 tertulis bahwa "Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kota." Fokus penulis pada penelitian ini adalah berfokus pada generasi muda khususnya di Kota Cimahi. dikarenakan potensi generasi muda terpapar kasus ini lebih besar karena yang secara psikologis mudah terpengaruh dan masih labil dibandingkan generasi di atasnya yang umumnya sudah lebih teguh kepada prinsipnya sehingga tidak mudah untuk dipengaruhi. Oleh karena itu diharapkan adanya kebijakan dalam menangani kasus-kasus tersebut dan mendukung pemerintahan Kota Cimahi dalam mencegah kalangan generasi muda terpengaruh oleh paham-paham radikalisme. Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah penulis uraikan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian "Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Internalisasi Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda untuk mencegah disintegrasi bangsa di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat".

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

GAP penelitian yang menjadi fokus pada penelitian ini merupakan internalisasi wawasan kebangsaan generasi muda khususnya di Kota Cimahi dengan munculnya kasus dan radikalisme terorisme yang menjangkit di kalangan generasi muda. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai peran untuk menangani kasus-kasus tersebut. Padahal Kota Cimahi merupakan kota militer namun masuk ke dalam salah satu kota dengan ancaman terorisme tertinggi yang berarti belum banyak masyarakat yang menanamkan nilai-nilai moral kebangsaan dan Pancasila sehingga dapat memicu disintegrasi bangsa. Penulis berfokus kepada generasi muda dikarenakan potensi generasi muda terpapar kasus ini lebih besar karena yang secara psikologis mudah terpengaruh dan masih labil dibandingkan generasi di atasnya yang umumnya sudah lebih teguh kepada prinsipnya sehingga tidak mudah untuk dipengaruhi. Pelaku narapidana terorisme sebagian besar berada di rentang umur usia 18-30 tahun yang menunjukkan bahwa banyaknya generasi muda yang terjerumus dalam kasus terorisme. Jumlah generasi muda pada rentang umur 15-29 rata-rata lebih banyak dibandingkan rentang umur di atasnya. Hal ini mengartikan bahwa sangat banyak generasi muda pelajar dan mahasiswa yang masih menempuh pendidikan dan apabila para generasi muda ini terjerembab dalam ideologi radikalisme dan terorisme yang menjadi tantangan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan tugasnya sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

1.3 Penelitian Terdahulu

penelitian terdahulu membantu penulis menemukan inspirasi baru dan memposisikan penelitian agar menunjukkan orisinalitas serta menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian lain, dalam konteks peran Badan Kesbangpol dalam meningkatkan internalisasi wawasan kebangsaan bagi generasi muda di Kota Cimahi. Penelitian Nawang Retno Dwiningrum & Basri. (2020) berjudul "Implementasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kota Balikpapan". Mengungkapkan bahwa Kesbangpol Kota Balikpapan sudah melaksanakan Program Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) secara masif dan dilanjutkan ke sekolah-sekolah SMP, SMA Negeri dan juga swasta. Upaya yang dilakukan meliputi sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan seperti sosialisasi pembinaan generasi muda yang meliputi teori serta prakteknya, sosialisasi talk show lewat radio, hingga diadakannya lomba penulisan karya tulis ilmiah mengenai wawasan kebangsaan (Dwiningrum & Basri, 2020).

Penelitian M. Rifki Alfani & Deni Yanuar. (2019) berjudul "Pegawai pada Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa (Studi Pada Kantor Badan Kesbangpol Aceh)". Menyatakan bahwa Pelaksanaan komunikasi informal pimpinan Bakesbangpol Aceh dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai pada Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa belum berjalan baik dan cenderung monoton sehingga pegawai tidak leluasa untuk terbuka dan terjadinya jarak antara pimpinan dan pegawai yang mengakibatkan suasana kerja yang tidak efektif dan efisien. Pimpinan perlu memaksimalkan komunikasi informal dan kerjasama dengan pegawai agar pelaksanaan bina ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa dapat berjalan maksimal (Alfani & Deni Yanuar, 2019).

Penelitian Gilang Zulfikar & Gigie Cahya Permady. (2021) berjudul "Citra Wawasan Kebangsaan Generasi Muda (Suatu Kajian Terhadap Sikap Anti Radikalisme)". Penelitian ini menyatakan globalisasi berdampak pada pergeseran nilai-nilai budaya lokal menjadi nilai-nilai universal dari arus globalisasi. Hal ini dapat menimbulkan ancaman yang dapat menimbulkan konflik dan disintegrasi bangsa. Arus globalisasi mengakibatkan mudah masuknya doktrin negatif kepada generasi muda jika memiliki wawasan kebangsaan yang rendah. Sehingga menerapkan wawasan kebangsaan pada generasi muda sangat penting sebagai generasi penerus masa depan bangsa (Zulfikar & Permady, 2021).

Penelitian lainnya adalah dari Nadia Zulfa Almagfiro. (2020) berjudul "Pembinaan wawasan kebangsaan bagi generasi muda untuk menghadapi disintegrasi bangsa (studi di kantor bangsa dan politik kota batu)". Penelitian ini mengungkapkan bahwa kurangnya inovasi baru dari pemerintah dalam program pembangunan wawasan kebangsaan menjadi

kendala yang membuat generasi muda kurang antusias dalam berpartisipasi membangun wawasan kebangsaan. Sehingga menurut penelitian ini diperlukan peran aktif Kesbangpol dalam berinovasi untuk pembinaan wawasan kebangsaan di Kota Batu(Almaghfiroh, 2020).

Penelitian terakhir bersumber dari Ilham Agung Ashariadi, (2021) berjudul “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat” menunjukkan bahwa peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik belum maksimal karena terdapat hambatan dalam proses penyelenggaraannya. Hambatan berupa kurangnya kuantitas dan kualitas pegawai serta penyusunan renstra, keterbatasan anggaran, kualitas silabus, dan kualitas SDM masyarakat yang kurang(Firstanty Praveira Philein, 2016).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni peran Badan Kesbangpol dalam meningkatkan internalisasi wawasan kebangsaan pada generasi muda di Kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan dari teori peran Soekanto dan yang menjadi pembeda adalah dari dimensi dan indikator yang digunakan. Dimensi dalam penelitian ini adalah dua jenis peran yaitu Peran Nyata dan Harapan Peran serta dua syarat peran yaitu Peran kedudukan dan Perilaku Peran sebagai alat analisis mengetahui cara yang benar-benar dijalankan oleh Bakesbangpol dalam menjalankan perannya dengan adanya harapan masyarakat terhadap kedudukan dan perilaku seharusnya Bakesbangpol bertindak.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menginternalisasi wawasan kebangsaan bagi generasi muda untuk mencegah disintegrasi bangsa di Kota Cimahi, mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dalam menginternalisasi wawasan kebangsaan bagi generasi muda di Kota Cimahi serta upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengatasi hambatan dalam menginternalisasi wawasan kebangsaan bagi generasi muda di Kota Cimahi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif induktif dalam penelitian ini mendeskripsikan Peran kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam internalisasi wawasan kebangsaan bagi generasi muda untuk mencegah disintragrasi bangsa di Kota Cimahi. Penelitian ini di lakukan dengan cara mengklasifikasikan, lalu menganalisa dan menyimpulkan data baru yang di simpulkan dari khusus ke umum. Sumber data dalam penelitian adalah subjek yang mana data dalam penelitian menggunakan subjek dari data yang diperoleh. Penulis menentukan informan dengan metode *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sumber informan dalam penelitian ini antara lain Kepala Kantor Kesabngpol, Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, KepalaBidang Penanganan Konflik dan Kerjasama Intelkam, Kepala-Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, dan tokoh masyarakat terdiri dari pelajar/mahasiswa, guru atau tokoh masyarakat yang berhubungan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini yakni teori Soekanto menggunakan pengukuran empat dimensi yakni Peran kedudukan , Harapan Peran, Peran Nyata, dan Perilaku Peran.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Internalisasi Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda untuk Mencegah Disintegrasi Bangsa di Kota

Cimahi

Peran Badan Kesantunan Bangsa dan Politik dalam internalisasi wawasan kebangsaan bagi generasi muda untuk mencegah disintegrasi bangsa di Kota Cimahi terbagi menjadi 4 dimensi bahasan berdasarkan teori peran Soekanto yaitu Peran Kedudukan, Harapan Peran, Peran Nyata, dan Perilaku Peran.

3.1.1 Peran Kedudukan

Peran Kedudukan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat, Sehingga peran kedudukan berikatan dengan norma atau peraturan (Tugas dan wewenang) yang dihubungkan dengan kedudukan Bakesbangpol dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan informasi-informasi dan hasil observasi penulis, pada dimensi peran kedudukan, Bakesbangpol Kota Cimahi telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana ketentuan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Pasal 185 ayat 2 yang mengharuskan Bakesbangpol melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam kehidupan masyarakat seperti yang telah dilaksanakan yaitu pemberian wawasan kebangsaan kepada forum generasi muda dengan sosialisasi, berkoordinasi dengan forum-forum masyarakat, dan memfasilitasi kegiatan positif yang dapat mempererat kerukunan masyarakat. Dengan menjalankan kedudukannya dengan baik maka hasil yang diperoleh nantinya akan sesuai dengan yang diharapkan. Sependapat dengan teori Ahmadi (1982) bahwa peran merupakan suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status, fungsi sosialnya. Melalui peran kedudukan maka akan memperjelas status dan fungsi sosial atau kedudukan Bakesbangpol dalam menjalankan hak dan kewajiban serta tugas dan wewenangnya.

3.1.2 Harapan Peran (*Expected Roles*)

Harapan masyarakat diperjelas dari penilaian masyarakat terhadap Bakesbangpol Kota Cimahi. Berdasarkan informasi dan data yang didapatkan oleh penulis, sulit mendapatkan penilaian ideal atau preferensi masyarakat yang baik jika keberadaannya tidak banyak diketahui, yang mengartikan indikator ini belum berjalan baik. Harapan dan kepedulian masyarakat terhadap suatu peran akan muncul apabila keberadaannya lebih terlihat di kalangan masyarakat luas sebagai penerima peran, karena harapan diperlukan untuk menjadi penilaian atau preferensi ideal dari Bakesbangpol Kota Cimahi. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Horoepoetri *et al* (2003) bahwa peran digunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan, penilaian dan preferensi dari masyarakat digunakan sebagai acuan yang berguna mewujudkan keputusan yang responsif.

Harapan masyarakat terhadap peran Bakesbangpol salah satunya adalah Bakesbangpol dapat berperan lebih dalam memberikan pembinaan wawasan kebangsaan kepada generasi muda khususnya para siswa yang berfokus dalam pengimplementasian Pancasila dan wawasan kebangsaan. Perlu upaya serius untuk menjaga bingkai persatuan dan kesatuan itu dari pengaruh ideologi diluar Pancasila yang mengancam keintegrasian NKRI. Berdasarkan pernyataan-pernyataan dari beberapa masyarakat bahwa terdapat harapan masyarakat terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi yaitu eksistensinya perlu lebih diketahui, memberikan pembinaan wawasan kebangsaan terhadap siswa di sekolah, dan terus memfasilitasi kegiatan forum demi mempertahankan kerukunan umat beragama di Kota Cimahi. Harapan-harapan terhadap peran tersebut sejalan dengan teori Berry (2009) yang menyebutkan bahwa peran merupakan sekumpulan harapan yang dibebankan kepada seseorang individu atau kelompok yang sedang menempati kedudukan sosial tertentu.

3.1.3 Peran Nyata (*Actual Roles*)

Hasil aktual dari pelaksanaan peran terkadang belum sesuai dengan yang di ekspektasikan disebabkan oleh berbagai hambatan saat menjalankan peran, bahwa belum semua rencana program dari Badan Kesbangpol Kota Cimahi berjalan dengan maksimal, yang disebabkan oleh hambatan seperti kurangnya dana anggaran untuk program-program yang dijalankan. Dari beberapa program, Bakesbangpol Kota Cimahi telah menjalankan salah satu programnya dengan cukup efektif sebagai pelaksanaan peran dalam pembinaan wawasan kebangsaan kepada salah satu forum di Kota Cimahi yaitu Forum Pembauran Kebangsaan. FPK yang beranggotakan berbagai macam suku dan budaya sebagai salah satu wujud dan upaya pemerintah daerah untuk menjalin sinergitas dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh etnis, tokoh pendidikan dan lain-lain, dan bertujuan untuk membangun kondisi sosial yang baik di kalangan masyarakat Kota Cimahi. Berdasarkan data yang penulis dapatkan, capaian program Bakesbangpol pada Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada tahun 2021 adalah sebesar 92% yang berarti hampir dari seluruh rencana kegiatan terealisasi. Namun perlu adanya peningkatan kegiatan melihat masih adanya rencana yang belum terealisasi karena terdapat berbagai hambatan seperti pelaksanaan program pembinaan wawasan kebangsaan ke sekolah-sekolah seperti salah satunya Jambore.

Berbagai penyesuaian perlu dilakukan Badan Kesbangpol Kota Cimahi jika terdapat hambatan atau ketidakcocokan terhadap peran yang dijalankan. Berdasarkan informasi dan data yang didapatkan, Badan Kesbangpol Kota Cimahi memerlukan penyesuaian dalam menjalankan peran sesuai dengan kondisi tertentu yaitu pada era digital ini, Badan Kesbangpol Kota Cimahi perlu menyesuaikan seperti mempublikasikan informasi melalui sosial media agar keberadaannya lebih menjangkau masyarakat sehingga memerlukan SDM pada bidang IT, selain itu juga perlu menyesuaikan anggaran demi menjalankan program yang direncanakan dan terlaksana maksimal. Sejalan dengan teori Hendropuspito (1989) bahwa terdapat peranan yang pelaksanaannya lebih luwes, serta terkadang perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu agar diterima oleh masyarakat setempat.

Terdapat dampak peran Bakesbangpol yang dirasakan oleh beberapa kalangan masyarakat. Kegiatan pembinaan untuk menginternalisasikan wawasan kebangsaan kepada generasi muda sudah dirasakan dampaknya oleh sebagian generasi muda di Kota Cimahi terutama yang tergabung dalam Forum Pembauran Kebangsaan, namun belum menyeluruh. Sehingga peran yang dijalankan dapat terbilang nyata namun belum berjalan maksimal.

3.1.4 Perilaku Peran

Badan Kesbangpol Kota Cimahi dalam pelaksanaan tugasnya belum berjalan maksimal dikarenakan Sumber Daya Manusia yang masih sulit untuk memahami peran dan fungsi mereka sebenarnya dikarenakan belum adanya diklat sebagai acuan. Selain itu suasana kantor Badan Kesbangpol Cimahi terbilang kurang nyaman yang membuat kinerja belum berjalan maksimal yang disebabkan kurangnya anggaran. SDM di lingkungan Bakesbangpol masih kurang memadai seperti kurang menguasai bidang IT menjadi menjadi hambatan kinerja yang belum berjalan dengan baik dan para staff Badan Kesbangpol Kota Cimahi belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsi yang perlu mereka jalankan karena belum adanya acuan yang diberikan dalam melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan sehingga perilaku atau tindakan yang dilakukan belum terlaksana secara baik. Berdasarkan hasil observasi dan data yang didapat, terdapat capaian penunjang yang belum terealisasi yaitu pengembangan sistem informasi dikarenakan kurangnya SDM dibidang IT, serta pembelian 3 (tiga) unit PC tidak dapat dilaksanakan dikarenakan anggaran tidak mencukupi. Kondisi tidak tercapainya jasa penunjang dapat mempengaruhi kinerja menjadi kurang maksimal, sejalan dengan pernyataan Soemanagara (2006) bahwa konsistensi atau perilaku dalam peran menunjukkan bagaimana seseorang bertindak dan berperilaku dengan cara tertentu ketika dihadapi dengan kondisi kehadiran

jumlah kekuatan lingkungan atau stimulus eksternal.

Cara Bakesbangpol Kota Cimahi menginternalisasikan wawasan kebangsaan dengan melalui seminar dan sosialisasi dua arah yang salah satu materinya adalah cara berkehidupan masyarakat yang berlandaskan Pancasila, UUD, dan Bhineka tunggal Ika sebagaimana halnya yang telah disebutkan dalam Permendagri No. 71 tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Cara Badan Kesbangpol Kota Cimahi menginternalisasikan wawasan kebangsaan kepada generasi muda yang merupakan implementasi dari peran yang berkaitan erat dengan perilaku serta sikap Badan kesbangpol dalam mencapai tujuan yaitu meningkatkan penanaman wawasan kebangsaan kepada generasi muda. Hal ini sejalan dengan pernyataan Widayatun (1999) menyatakan bahwa peran merupakan pola sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan dari individu atau kelompok berdasarkan posisinya di masyarakat.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat

3.2.1 Faktor Penghambat

Sumber daya keuangan atau anggaran merupakan hal penting untuk menunjang kegiatan operasional wawasan kebangsaan. Hal ini merupakan faktor penghambat utama yang menyebabkan pelaksanaan peran tidak terlaksana dengan maksimal seperti program yang sudah direncanakan untuk dijalankan namun karena anggaran tidak mencukupi menjadi tidak terlaksanakan. Bakesbangpol memiliki kewenangan yang besar untuk memberikan wawasan kebangsaan namun dalam menjalankannya perlu bantuan-bantuan berupa anggaran serta sarana prasarana agar program-program yang dijalankan dengan maksimal.

Selain itu keterbatasan anggaran juga disebabkan oleh pengeluaran anggaran-anggaran yang terlalu besar terhadap hal lain yang menyebabkan dana yang diperuntukan untuk menjalankan program-program wawasan kebangsaan menjadi kurang. Sumber dana yang dimiliki Badan Kesbangpol Kota Cimahi belum cukup untuk melaksanakan kegiatan internalisasi wawasan kebangsaan secara maksimal. Diperlukan anggaran untuk program sosialisasi agar dapat dilaksanakan ke seluruh sekolah dan masyarakat umum serta dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan yang tidak terlepas dari sarana dan prasarana operasional yang memadai juga memerlukan anggaran.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kualitas SDM khususnya dalam Bidang komunikasi dan IT Bakesbangpol terbilang kurang. Dalam era digital kemampuan IT sangat dibutuhkan untuk menunjang seluruh kegiatan. Banyaknya arus informasi dan komunikasi yang dapat memberikan peluang besar untuk menyebarkan informasi. Hal ini berdampak pada aktivitas sosial masyarakat khususnya kalangan generasi muda, sehingga teknologi digital dapat menjadi peluang dalam memberikan informasi wawasan kebangsaan kepada generasi muda agar lebih dekat dan menyeluruh. Belum adanya buku pedoman dari kemendagri juga menyebabkan Bakesbangpol Kota Cimahi kesusahan dalam memberikan pelatihan kepada stafnya sehingga kualitas SDM menjadi hambatan. Selain itu, masih banyaknya kekosongan jabatan serta jumlah pegawai yang tergolong sedikit.

Sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadi salah satu hambatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Cimahi dalam melakukan tugasnya salah satunya internalisasi wawasan kebangsaan. Sarana prasarana kantor Bakesbangpol masih kurang memadai dilihat dari suasana kantornya yang sempit, setelah pindah kantornya pun sama masih banyak infrastruktur yang rusak sehingga kurang nyaman. Kantor Bakesbangpol yang sempit mengharuskan Badan Kesbangpol Kota Cimahi pindah ke tempat baru yang merupakan kantor yang dahulunya adalah DPMPSTSP Kota Cimahi. Sarana dan prasarana di kantor tersebut masih kurang memadai, jaringan internetnya masih sering putus sehingga menghambat pekerjaan seperti jika akan diadakan rapat, kunjungan tamu dari luar menjadi kurang kondusif. Fasilitas atau infrastruktur di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

kota Cimahi menunjukkan masih banyaknya sarana-sarana teknis yang rusak, bahkan pada infrastruktur kantor baru hampir 20% memiliki lantai yang rusak. Sarana prasarana kantor sangat perlu diperhatikan dikarenakan kantor merupakan tempat utama Bakesbangpol dalam menjalankan tugasnya agar dapat berperan lebih baik lagi.

3.2.2 Faktor Pendukung

Terdapat beberapa factor pendukung yang mempermudah Bakesbangpol Kota Cimahi dalam menginternalisasikan wawasan kebangsaan. Wilayah Cimahi yang tergolong kecil dengan 3 kecamatan yang dapat dicangkup oleh Bakesbangpol dalam menginternalisasi wawasan kebangsaan dalam mencegah disintegrasi bangsa di Kota Cimahi. Dengan wilayah Kota Cimahi yang tidak terlalu luas seharusnya memberikan peluang untuk Bakesbangpol dalam mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di Kota Cimahi, sehingga dapat mempermudah Badan Kesbangpol untuk lebih menjangkau dan memperhatikan masyarakat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya salah satunya menginternalisasikan wawasan kebangsaan kepada generasi muda.

Faktor pendukung lainnya, dalam pelaksanaan internalisasi wawasan kebangsaan sudah banyak instansi lain yang mau mendukung kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Bakesbangpol seperti FPK (Forum Pembauran Kebangsaan), BNN (Badan Narkotika Nasional), DPR, serta TNI POLRI. Program wawasan kebangsaan dibantu oleh instansi-instansi tersebut dalam mengurus kegiatan, serta koordinasi dengan narasumber dari luar untuk memberikan materi mengenai wawasan kebangsaan. Selain itu, informasi lain yang diberikan oleh Bapak Hendra selaku Kepala Bidang Pengawasan Konflik, menyatakan bahwa dalam mengawasi dan menangani konflik di kalangan masyarakat, Bakesbangpol bekerjasama dengan FKDM (Forum Kewaspadaan Daerah), Kominda (Komisi Intelegen Daerah), serta Forkopimda (Forum koordinasi pimpinan daerah). Bakesbangpol melalui Permendagri Nomor 71 tahun 2012 diwajibkan menggandeng stakeholder yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan seperti Pemerintah, TNI, POLRI, Universitas, PGRI, DPRD, tokoh masyarakat dan lain-lain.

Selain itu, perilaku masyarakat sangat berpengaruh dalam terjalannya keintegrasian dalam suatu wilayah. Berdasarkan data yang didapat, Kota Cimahi jarang terjadi konflik yang berhubungan dengan SARA, padahal Kota Cimahi merupakan kota yang masyarakatnya terdiri berbagai macam suku, etnis, dan budaya. Kota Cimahi dianggap sebagai Kota Militer karena di dalamnya terdapat 13 pusdik militer yang secara otomatis membawa berbagai etnis yang ada di Indonesia sehingga masyarakatnya sudah terbiasa dengan perbedaan sejak dahulu. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian Safariah & Putra (2018) yang menyatakan bahwa Citra Kota Cimahi sebagai Kota Militer cukup kuat dalam penilaian masyarakat Kota Cimahi dari aspek potensi (27%) dan sejarah (91%). Presentase kinerja Badan Kesbangpol Kota Cimahi dalam penanganan konflik tergolong tinggi, dimana pada tahun 2019 konflik dapat dicegah hingga 100%, dan pada 2020 dan 2021 sebesar 80%. Hal ini menunjukkan bahwa konflik yang ada di Kota Cimahi dapat dengan mudah dilakukan pencegahan.

3.3 Upaya yang Dilakukan

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mencapai pengukuran serta capaian dan analisa-analisa yang akan dilakukan, maka upaya tindak lanjut Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Cimahi sebagai berikut :

1. Untuk kekurangan personil dikarenakan adanya kekosongan akibat mutasi, promosi dan pensiun, maka akan dilakukan koordinasi dengan BKPSDMD.
2. Berkoordinasi dengan TAPD dalam penganggaran sehubungan kenaikan status kantor menjadi badan kesbangpol serta mengkoordinasi kembali beberapa program dan kegiatan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal sebagai mitra pelaksana urusan

kesatuan bangsa dan politik di Kota Cimahi dalam membantu mewujudkan kondusifitas kota cimahi, sehingga keberlangsungan pembangunan Kota Cimahi dapat terjaga.

4. Kontinuitas pembinaan dan penguatan komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat/kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan dalam upaya menjaga kondusifitas wilayah Kota Cimahi (Bakesbangpol Kota Cimahi, 2021).

Badan Kesbangpol Kota Cimahi telah banyak bekerja sama dengan instansi lain dalam mengatasi hambatan kegiatan yang dilakukan sehingga program pembinaan wawasan kebangsaan dapat berjalan lebih efektif dan maksimal serta mempermudah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dalam mengkoordinasikan kegiatan. Selain itu Badan Kesbangpol Kota Cimahi juga berupaya dalam menyamakan persepsi dengan merangkul *stakeholders* pemerintah daerah, TNI, POLRI dengan masyarakat untuk mencapai visi yang sama dalam menjaga kesatuan dan persatuan di Kota Cimahi. Upaya-upaya tersebut dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan dalam mencapai capaian program.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menginternalisasi wawasan kebangsaan bagi generasi muda untuk mencegah disintegrasi bangsa sudah berjalan dengan cukup baik dan beberapa program sudah berjalan salah satunya mengadakan forum sosialisasi wawasan kebangsaan kepada generasi muda. Namun terdapat beberapa indikator yang belum terlaksana dengan optimal dikarenakan hambatan-hambatan seperti keterbatasan anggaran, Sumber Daya Manusia kurang memadai serta infrastruktur kantor kurang memadai. perlu adanya peningkatan kegiatan melihat masih adanya rencana yang belum terealisasi seperti pelaksanaan program pembinaan wawasan kebangsaan ke sekolah-sekolah seperti salah satunya Jambore. Sama halnya dengan penelitian Dwiningrum dan Basri yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan oleh Kesatuan Bangsa Kesbangpol Kota Balikpapan belum bisa menjangkau sosialisasi ke semua sekolah dan masyarakat umum karena kurangnya SDM dan terdapat sekolah yang masih menolak menerima pembinaan pendidikan wawasan kebangsaan (Dwiningrum & Basri, 2020). Dalam mengatasi hambatan tersebut, upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan badan dan Politik Kota Cimahi adalah menjalin kerjasama dengan instansi lain dan merangkul beberapa *stakeholders* seperti pemerintah daerah, TNI, POLRI untuk mengatasi kekurangan demi mencapai kelancaran program. Dalam penelitian Barokhah (2021) upaya ini juga diterapkan oleh Bakesbangpol Provinsi Balikpapan yang membangun kerjasama yang baik antara badan Kesbangpol Provinsi, OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dan Pemerintah serta melibatkan lembaga-lembaga lain dalam membantu pelaksanaan program.

IV. Kesimpulan

- 1) Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menginternalisasi wawasan kebangsaan bagi generasi muda untuk mencegah disintegrasi bangsa telah dilaksanakan, namun terdapat beberapa dimensi atau indikator yang belum terlaksana dengan optimal yaitu:
 - a) Harapan peran: Penilaian ideal masyarakat belum tergolong baik karena eksistensi Badan Kesbangpol belum banyak diketahui, sehingga sulit mendapatkan penilaian ideal atau preferensi yang baik.
 - b) Peran nyata: perlu adanya peningkatan kegiatan melihat masih adanya rencana yang belum terealisasi seperti pelaksanaan program pembinaan wawasan kebangsaan ke sekolah-sekolah seperti salah satunya Jambore, serta perlu menyesuaikan peran dalam bidang IT dan anggaran agar program yang direncanakan terlaksana dan berjalan maksimal.

- c) Perilaku peran: Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai khususnya bidang IT dan belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsi yang perlu mereka jalankan karena belum adanya diklat sebagai acuan, sehingga kinerja tidak maksimal.
- 2) Faktor penghambat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dalam menginternalisasi wawasan kebangsaan bagi generasi muda untuk mencegah disintegrasi bangsa antara lain: keterbatasan anggaran, Sumber Daya manusia (SDM) yang kurang memadai khususnya dalam bidang IT, serta infrastruktur kantor yang kurang memadai untuk pelaksanaan kegiatan. Sedangkan untuk faktor pendukungnya yaitu: Wilayah Kota Cimahi yang tidak terlalu luas sehingga mempermudah untuk menjangkau dan memantau masyarakat, didukung dengan masyarakat yang saling toleransi ditengah banyaknya perbedaan etnis dan budaya di Kota Cimahi, serta adanya kerjasama yang baik dengan stakeholders dari instansi lain dalam mendukung terlaksananya program wawasan kebangsaan.
- 3) Upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan badan dan Politik Kota Cimahi untuk mengatasi hambatan dalam menginternalisasi wawasan kebangsaan bagi generasi muda untuk mencegah disintegrasi bangsa yaitu menjalin kerjasama dengan instansi lain untuk mengatasi kekurangan yang menghambat program yang dilaksanakan seperti kerjasama dengan FPK dalam menjalin koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh etnis, dan tokoh pendidikan, FKDM, TNI POLRI dan Kominda dalam membantu memantau kondisi daerah di Kota Cimahi, BNN dalam kerja sama melaksanakan program pembinaan wawasan kebangsaan, Forkopimda yang merupakan pemerintah daerah membantu mendukung pelaksanaan program wawasan kebangsaan, serta beberapa instansi lainnya.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kota saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori Soekanto (2002).

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut pada lokasi serupa berkaitan dengan internalisasi wawasan kebangsaan bagi generasi muda untuk mencegah disintegrasi bangsa yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Politik Kota Cimahi untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. Daftar Pustaka

- Ahmadi, A. (1982). *Psikologi Sosial*. PT. Bina Ilmu Soerjono.
- Alfani, M. R., & Deni Yanuar. (2019). Komunikasi Informal Pimpinan dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai pada Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa (Studi pada Kantor Badan Kesbangpol Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 4(4).
- Almaghfiroh, N. Z. (2020). *Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Muda Untuk Menghadapi Disentegrasi Bangsa (Studi Kasus Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batu)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Bakesbangpol Kota Cimahi. (2021). *LKIP Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi Tahun 2021*. Bakesbangpol Kota Cimahi.
- Barokhah, I. M. (2021). *Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Menangani Konflik*

- Sosial di Provinsi Jambi*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
- Berry, D. (2009). *Pokok-Pokok Pikiran daalam Sosiologi* (Raja (ed.)). Grafindo Persada.
- Dwiningrum, N. R., & Basri. (2020). Implementasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Di Kota Balikpapan. *Publica : Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(2), 285. <https://doi.org/10.33772/publica.v11i2.14622>
- Firstanty Praveira Philein. (2016). *Pembinaan Wawasan Kebangsaan oleh Kantor Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) Bagi Siswa SMA/SMK di Kabupaten Majalengka*.
- Hendropuspito. (1989). *Sosiologi Sistematis*. Kanisius.
- Horoepoetri, Arimbi, & Santosa, A. (2003). *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*. Walhi.
- Safariah, R., & Putra, R. E. (2018). Persepsi Masyarakat Tentang Citra Kota Cimahi sebagai Kawasan Militer. *Jurnal Manajemen Informatika*, 2(2), 49–60.
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Bumi Aksara.
- Soemanagara, R. D. (2006). Persepsi Peran, Konsistensi Peran, dan Kinerja. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 3(4), 270–287.
- Widayatun, T. R. (1999). *Ilmu perilaku* (2nd ed.). Sagung Seto.
- Zulfikar, G., & Permady, G. C. (2021). Citra Wawasan Kebangsaan Generasi Muda: suatu kajian terhadap sikap anti radikalisme. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7(2), 419–424. <https://doi.org/10.31949/educatio.v7i2.1063>